

SKRIPSI

PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN JEMBRANA



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I KOMANG ERY ASTRAWAN
NIM : 1915644106**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I Komang Ery Astrawan

1915644106

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang meliputi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sumber yang berpotensi untuk daerah dan sebagai tolak ukur dalam kemandirian daerah sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data. Pendekatan deskriptif kuantitatif menggambarkan pengaruh Retribusi Daerah (X_1) dan Pajak Daerah (X_2) terhadap PAD (Y) di Kabupaten Jembrana tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang akan diuji secara empiris dan berdasarkan data sekunder. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Selanjutnya data diolah menggunakan beberapa uji prasyarat diantaranya normalitas dan regresi linear berganda. Untuk pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji parsial (t) pada hipotesis 1 dan 2, uji simultan (F) untuk hipotesis 3. Dan koefisien determinasi untuk melihat besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, (1) hasil uji normalitas dengan analisis Kolmogorov-Smirnov Test menggunakan program statistik SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,77 untuk data Retribusi Daerah, 0,126 untuk data Pajak Daerah dan 0,20 untuk data Pendapatan Asli Daerah. (2) Pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan maka pendapatan asli daerah 13768245453,498, retribusi daerah memiliki nilai positif sebesar 3,550, dan pajak daerah memiliki nilai positif sebesar 21,056. (3) Berdasarkan hasil penelitian, keterkaitan antara retribusi daerah pajak daerah dan pendapatan asli daerah ditandai dengan adanya temuan bahwa terdapat kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti, semakin tinggi retribusi daerah dan pajak Daerah, maka semakin tinggi pendapatan asli daerah. Begitu pula sebaliknya.

Kata kunci: **Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.**

THE INFLUENCE OF REGIONAL RETRIBUTIONS AND REGIONAL TAXES REGIONAL INCOME OF JEMBRANA DISTRICT

**I Komang Ery Astrawan
1915644106**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Regional Own Revenue is a source of regional income which includes Regional Taxes, Regional Levies, Results of Management of Separated Regional Wealth and Other Legitimate Regional Original Revenues. Regional Taxes and Regional Levies are a potential source for the region and as a benchmark in the independence of the region itself.

This research is a quantitative descriptive research with data collection methods. A quantitative descriptive approach describes the effect of Regional Levies (X_1) and Regional Taxes (X_2) on Original Local Government Revenue (Y) in Jembrana Regency from 2020 to 2022 which will be tested empirically and based on secondary data. Collecting research data using documentation techniques, interviews and observation. Furthermore, the data was processed using several prerequisite tests including normality and multiple linear regression. To test the research hypothesis using a partial test (t) on hypotheses 1 and 2, simultaneous test (F) for hypothesis 3. And the coefficient of determination to see the magnitude of the influence of the independent variables on the dependent variable.

The results of the study stated that, (1) the results of the normality test using the Kolmogorov-Smirnov Test analysis using the SPSS statistical program obtained a significance value of 0.77 for Regional Retribution data, 0.126 for Regional Tax data and 0.20 for Regional Original Revenue data. (2) Testing multiple linear regression in this study shows that local revenue is 13768245453.498, regional levies have a positive value of 3.550, and regional taxes have a positive value of 21.056. (3) Based on the results of the study, the link between regional tax levies and regional own-source revenue is indicated by the finding that there is a contribution of regional levies and regional taxes to regional-original revenues. This means, the higher the regional fees and regional taxes, the higher the regional original income. Vice versa.

Keywords: Local Taxes, Local Retributions and Original Local Government Revenue

**PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi
Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : I KOMANG ERY ASTRAWAN
NIM : 1915644106**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Komang Ery Astrawan

NIM : 1915644106

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana

Pembimbing : Dra. Ni Ketut Masih, MM
I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A

Tanggal Uji : 25 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 25 Agustus 2023



Komang Ery Astrawan

SKRIP

PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

DIAJUKAN
OLEH:

NAMA : I KOMANG ERY ASTRAWAN
NIM : 1615644124

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

Dra. Ni Ketut Masih, MM
NIP. 19641129 199303 2 001

DOSEN PEMBIMBING II

I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A
NIP. 19601231 199003 1 015

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



SKRIPSI

PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:

Dra. Ni Ketut Masih, MM
NIP. 19641129 199303 2 001

ANGGOTA:

2. I Komang Sugiarta, SE, MMA
NIP. 19620106 199212 1 001

3. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS, DEA
NIP. 19710120 199412 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana” tepat waktu. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Dalam Penulisan skripsi ini daya mendapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepadanya:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Bapak Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Dra. Ni Ketut Masih, MM selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Bapak I Nyoman Sugiarta, SE., M.M.A selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Adminitrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang turut membantu proses penyusunan skripsi secara langsung maupun tidak langsung.

7. Bapak/Ibu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana
8. Seluruh pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga, saudara, teman-teman serta pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan yang baik secara moral dan material dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan keterbatasan kemampuan yang saya miliki, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesemournaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.



Badung, Agustus 2023

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
I Komang Ery Astrawa

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori	10
1. Retribusi Daerah	10
2. Pajak Daerah	14
3. Pendapatan Asli Daerah	17
B. Kajian Penelitian yang Relevan	20
C. Kerangka Pikir dan Konseptual	25
D. Hipotesis Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
E. Populasi & Sampel.....	27
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	27
G. Variabel Penelitian dan Definisi	28
H. Analisis Data.....	29
1. Uji Regresi Linear Berganda.....	29
2. Uji Normalitas.....	30
3. Pengujian Hipotesis.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Data.....	36
1. Deskripsi Data Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana	36
2. Deskripsi Data Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana	39
3. Deskripsi Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana	41
B. Hasil Uji Hipotesis	43
1. Uji Normalitas.....	43
2. Analisis Regresi Linier Berganda	44
3. Uji t (Secara Parsial)	46
4. Uji F (Secara Simultan).....	48
5. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian	51
1. Analisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	51
2. Analisis Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	51
D. Keterbatasan Penelitian.....	53
BAB V SIMPULAN & SARAN	54
A. Simpulan	54
B. Implikasi	55
C. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	63

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1 Uji Normalitas Data	43
Tabel 4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda	44
Tabel 4.2.3 Hasil Uji t (Parsial)	47
Tabel 4.2.4 Hasil Uji F (Simultan).....	49
Tabel 4.2.5 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 2.2 Skema Menghubungkan Variabel	26
Gambar 4.1.1 Grafik Retribusi Daerah Tahun 2020-2022.....	38
Gambar 4.1.2 Pajak Daerah Tahun 2020-2022 Pemerintah Kabupaten Jembrana	40
Gambar 4.1.3 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2022 Pemerintah Kabupaten Jembrana	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pendapatan Daerah per bulan dan laporan PAD yang lain-lain dari Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Jembrana	59
Lampiran 2 Rekapan Data per Bulan Retribusi Daerah.....	63
Lampiran 3 Rekapan Data per Bulan Pajak Daerah.....	64
Lampiran 4 Rekapan Data per Bulan Pendapatan Asli Daerah.....	65
Lampiran 5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	66
Lampiran 6 Hasil Uji t (Parsial)	67
Lampiran 7 Hasil Uji F (Simultan).....	68
Lampiran 8 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan berpegang teguh pada standar desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan pintu terbuka dan kehati-hatian kepada daerah untuk mengatur kemandirian daerah (otonomi daerah). Menurut pasal 1 ayat 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa, daerah memiliki kewenangan untuk mengontrol bagaimana sumber daya nasional didistribusikan dan digunakan, serta didalamnya termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ekspansi ekonomi dan pembangunan daerah juga dapat dipercepat dengan adanya otonomi daerah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Selain untuk mendeklasikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah daerah, bahwa harus dipastikan pemerintah daerah mampu mengelola rumah tangganya sendiri secara profesional, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, dan mengelola keuangan daerah.

Prinsip administrasi keuangan daerah dilaksanakan secara moneter, produktif, dan aktual dan sesuai dengan standar administrasi yang baik untuk membuat administrasi yang bertanggung jawab dan terbuka. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang Penyelenggaran ini bertujuan dalam pengembangan otonomi daerah khususnya Kabupaten dan Kota dijalankan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional kepada pemerintah daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilakukan melalui pendeklegasian kewenangan yang luas, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pendeklegasian tugas akan diikuti dengan langkah-langkah pemerataan alokasi dan penggunaan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu dampak dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah merupakan dua aspek pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perubahan (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik akan dipengaruhi oleh kewenangan yang diberikan kepadanya. Pengaturan di bidang penggajian daerah pada dasarnya diarahkan untuk memperluas batas moneter daerah dalam mendukung usaha-usaha rumah tangganya secara otonom. Dengan demikian, daerah harus memberikan sumber-sumber pendukung yang memuaskan dan meminta imajinasi teritorial

dan kapasitas otoritas daerah dengan tujuan akhir untuk menyelidiki kemampuan kabupaten untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Untuk itu, daerah harus menyediakan sumber pembiayaan yang tepat, inovasi daerah yang memadai, dan kemampuan aparatur daerah dalam menggali sumber daya daerah guna mendongkrak pendapatan daerah (Mardiasmo. 2002)

Daerah harus memberikan sumber-sumber pendukung yang memuaskan dan membutuhkan ide dan kapasitas otoritas daerah dengan tujuan akhir untuk menyelidiki kemampuan kabupaten untuk meningkatkan pendapatan daerah. Bahwa pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan merupakan landasan keberlangsungan otonomi daerah dalam jangka panjang dan fondasi pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolbaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 20 UU No 1 Tahun 2022).

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Ayat 21 UU No 1 Tahun 2022). Hal tersebut menunjukan adanya kontribusi yang

diberikan oleh masyarakat untuk ikut membangun daerah melalui wajib pajak yang dibayarkan kepada negara dan daerah mengelolanya sebagai hak penyelenggara pemerintahan yang otonom.

Selanjutnya retribusi daerah yang juga merupakan salah satu penerimaan pendapatan asli daerah yang juga tertuang didalam undang-undang yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Ayat 22 UU No 1 Tahun 2022). Retribusi daerah diharapkan dapat menunjang sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemerataan perekonomian daerah serta kesejahteraan penduduknya.

Pendukung pendapatan asli daerah yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Mahfudh, dkk (32: 2022) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. (b) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bersumber pada hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, dan pendapatan dari pengembalian. Tentu hal ini diikuti dengan kebijakan daerah yang ikut mendukung dalam pengelolaan beberapa pendapatan tersebut.

Pengelolaan administrasi daerah dalam hal ini adalah keuangan daerah yang akuntabilitas akan ditunjukkan dengan manajemen yang kuat.

Mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dengan peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah parameternya. Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan salah satu daerah yang juga disetujui untuk melaksanakan otonomi daerah. Sehingga pemerintah Kabupaten Jembrana diberikan keistimewaan dan komitmen dalam mengurus wilayahnya.

Dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ditunjuk oleh negara, Kabupaten Jembrana dipercaya dapat menggali potensi provinsi yang dimilikinya sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan dan subsidi dari negara. PAD (Pendapatan Asli Daerah) bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Kebijakan mengenai pendapatan asli daerah telah diatur dalam perundangan yang menuntut Pemerintahan Kabupaten Jembrana untuk memaksimalkan pemungutan pendapatan asli daerah guna memenuhi pencaipaihan target.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Angaran tahun 2020 – 2022 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana menunjukkan peningkatan dan penurunan yang signifikan, mengingat pada tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan. Berikut ini

data anggaran pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Tabel 1.1 Rekapan Data Retribusi Daerah, Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2022 Pemerintah Kabupaten Jembrana (dalam Rupiah)

Pendapatan Daerah	Retribusi Daerah	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2020	9.591.528.844	34.371.564.433	148.045.102.854
Tahun 2021	8.483.625.074	38.129.873.223	185.003.035.365
Tahun 2022	9.204.968.003	48.793.825.835	175.992.613.174
Total	27.280.121.921	121.295.263.491	509.040.751.393

Sumber: Lampiran 2, 3, 4

Berdasarkan data pendapatan daerah diatas, dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran pada Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 Retribusi Daerah Kabupaten Jembrana menjadi yang tertinggi sebesar Rp9.591.528.844. dan nilai terrendah pada tahun 2021 sebesar Rp8.483.625.074. Pada Tahun 2020 Pajak Daerah Kabupaten Jembrana menjadi yang terendah sebesar Rp34.371.564.433 dan pada tahun 2022 menjadi yang tertinggi sebesar Rp48.793.825.835,. Pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana menjadi nilai tertinggi sebesar Rp183.003.035.365,. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah dan optimal dalam pengumungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil yang dijelaskan secara umum bahwa pendapatan asli daerah yang setiap tahunnya memiliki realisasi yang jelas dan terperinci adalah

retribusi daerah dan pajak daerah. Selain itu penempatan anggaran retribusi daerah dan pajak daerah memiliki nilai realisasi yang cukup signifikan. Di Kabupaten Jembrana sendiri, pengelolaan retribusi, pajak daerah dan pendapatan asli daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016). Didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Azizati Ainul Haq et al., (2022) yang berjudul “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa” menunjukkan bahwa retribusi daerah terhadap berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil secara simultan, retribusi dan pajak daerah menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jembrana?

3. Bagaimanakah pengaruh retribusi dan pajak daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jembrana?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tahun data yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan analisis data pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Analisis data yang digunakan adalah tiga tahun terakhir laporan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana perbulan pada tahun 2020, 2021 dan 2022, serta keterbatasan peniliti dalam meneliti data yang dianalisis. Tujuan dari adanya batasan ini agar topik permasalahan terarah dan tidak terjadi penyimpangan topik permasalahan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencoba mengetahui potensi daerah Kabupaten Jembrana dalam upaya meningkatkan PAD melalui retribusi daerah dan pajak daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh positif retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jembrana.
- b. Untuk mengetahui pengaruh positif pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jembrana.
- c. Untuk mengetahui pengaruh positif retribusi pajak daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jembrana.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemikiran dalam topik retribusi daerah dan pajak daerah pada pemerintah daerah, serta sebagai karya ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang dipelajari dalam perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada.
- b. Untuk pemerintah daerah, penelitian ini dirancang untuk memberikan komentar positif kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pungutan daerah dan meningkatkan pemungutan retribusi bagi daerah dalam meningkatkan retribusi daerah serta pajak daerah di Kabupaten Jembrana.
- c. Untuk mahasiswa, semoga penelitian ini bermanfaat bagi para mahasiswa dalam rangka seberapa pengaruh dan sebagai referensi atau bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang retribusi daerah, pajak daerah dan pendapatan asli daerah di setiap Daerah.

BAB V

SIMPULAN & SARAN

A. Simpulan

Retribusi daerah dan pajak daerah adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah menjadi penopang kemampuan suatu daerah untuk memberikan potensi memungut kekayaan suatu daerah. Dalam menerapkan otonomi daerah, retribusi daerah dan pajak daerah termasuk dalam upaya meningkatkan PAD sebagai mewujudkan tanggung jawab pemerintah daerah dan untuk meningkatkan pelayanan, kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan hasil sebagai berikut:

1. Retribusi Daerah memiliki nilai signifikansinya $0,046 < 0,05$ dan t hitung $2,437 <$ tabel $2,034$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, artinya retribusi daerah berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah.
2. Pajak Daerah memiliki nilai sebesar $0,020 < 0,05$ dan t hitung $2,210 <$ tabel $2,034$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, artinya pajak daerah berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah.
3. Dari Hasil uji F secara simultan, nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar $7,764 > 3,276$. . Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, artinya retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana.

Dari hasil Koefisien Determinasi yang dilakukan, retribusi daerah (X1) dan pajak daerah (X2) menunjukkan angka sebesar 0,566 Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 56,6% sedangkan sisanya sebesar 43,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, bisa memberikan dampak pada pendapatan asli daerah yang dimana retribusi daerah dan pajak daerah adalah suatu objek pemungutan pajak atas pelayanan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk upaya mengoptimalkan kekayaan daerah.

C. Saran

Adapun saran penulis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana diharapkan lebih mengoptimalkan potensi pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian dengan menambah variabel yang berpengaruh bagi pendapatan asli daerah dan memperluas pengamatannya

DAFTAR PUSTAKA

- Aryagus Wiguna, K., & Jati, I. (2019). *Pengaruh Pajak Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.*
- Azizati Ainul Haq, Aldi Bahtera, & Usman. (2022). *Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa.*
- Ersita, M. (2016). *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.*
- Hardani. (2020). Jakarta.
- I Putu Agus, S., & Gede Mertha, S. (2020). *Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah.*
- Kamarolleh, A. (2021). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- L., H., M., W., & Desfitrina. (2020). *The Effects Of Economic Crisis On Business finance. International Journal of Economics and Financial Issues.*
- M, R. (2013). *Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) gunamendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Bogor.*
- Mardiasmo. (2002). In O. d. Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Martanto, N. (2011). In M. P. Data. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nursali, M. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, T. P. (n.d.). From Peraturan BPK: <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Putriani, E. (2016). *Dampak Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.*
- Rahmadani, A. (2018). *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.*
- Ramadhan, P. R. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumatera Utara.*
- Ramadhan, P. R. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah & Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara.*
- Randi Maikel Mohede, D. C. (2020). *Analisis Kontribusi Serta Prediksi Pajak dan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.*
- Riana Desi, L. R. (2022). *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh.*
- Roslina, N. (2016). *Iuran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

- Rukmana Is Lampunu, R. A. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2013-2017)*.
- Saputri, V. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara*.
- Sirajuddin. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng*.
- Sugiyono. (2018). In K. d. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syermi, M., & Diana Latjandu, L. (2019). *Analisis Kobtribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Talaud*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, T. H. (2022). From Peraturan BPK:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, T. P. (2014). From Peraturan BPK:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Vivi Anggraini, K. H. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya*.
- Warsito. (2011). In *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Semeta Media.
- Yusmalina, Lasita, & Fauzan Haqiqi. (2019). *Pengaruh Pajak dan Rertribusi Daerah pada BAPENDA Kabupaten Karimun*.
- Yusuf, A. M. (2019). Jakarta: Prenadamedia.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI